

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN LUWU TIMUR

ANDI TENRI DETTYA ULENG PANGERANG



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN LUWU TIMUR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI TENRI DETTYA ULENG PANGERANG
A31113523**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN LUWU TIMUR

disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRI DETTYA ULENG PANGERANG
A31113523

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

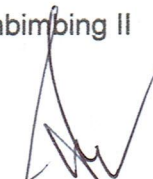
Makassar, 24 Maret 2017

Pembimbing I



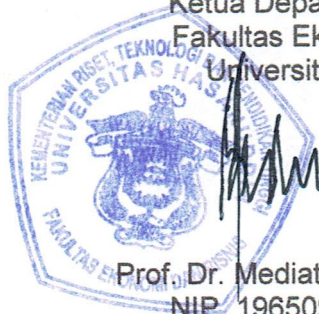
Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19651127 199103 2 001

Pembimbing II



Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP., CA
NIP. 19561121 198603 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN LUWU TIMUR

disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRI DETTYA ULENG PANGERANG
A31113523

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Mei 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1.
2.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP., CA	Sekretaris	2.
3.	Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.
4.	Drs. M. Christian Mangiwa., Ak., M.Si., CA	Anggota	4.
5.	Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA	Anggota	5.

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Andi Tenri Dettya Uleng Pangerang
NIM : A31113523
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN LUWU TIMUR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,



Andi Tenri Dettya Uleng Pangerang

PRAKATA



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur” dalam bentuk maupun isi yang sangat sederhana yang merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam proses bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan. Oleh karena itu peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Andi T. Umar Pangerang dan Ibu tercinta Islawaty A.Ichsan yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik yang bersifat material maupun non material, serta do'a yang tiada hentinya untuk mendukung kesuksesan anaknya guna menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP., CA selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan dari awal hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA selaku Ketua dan Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku Penasehat Akademik peneliti, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari awal kuliah hingga selesainya peneliti menempuh studi.
5. Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., MS., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, Bapak Drs. M. Christian Mangiwa., Ak., M.Si., CA, Bapak Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA, selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
8. Saudaraku Iswan Adhiputra dan Wija Indrawan, om, tante, Prof. Rahman Kadir, Kak Najmi, dan Kak Wawan yang selalu memberikan dukungan, saran, bantuan dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para pegawai Departemen Akuntansi diantaranya: Pak Ical, Pak Aso, Pak H. Tarru, dan pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis diantaranya: Bu Susi, Pak Bur, Pak Ambang dan seluruh staff lainnya.
10. Asti Puspita, Claudia Palembang, Icha Syahnur, Talita Rahma, Ratih Sagita, Ausi Sari, Salsabila, Fitri Rahmawati, Kiki Ayu, Dwi Kartiko, Ulfa Ramadhani, Safaat D.N, Asyil, Nana Ramdhani, Asniar, Syarafina,

Danty Wildam, Chandrika, Thesy, Sutami, Jenifer, Shendy, Susan, dan Ghina yang banyak membantu peneliti dari awal kuliah, memberikan doa, motivasi dan pelajaran berharga kepada peneliti selama ini. *Your not only best friends for me, but also my most valuable person in my life.*

11. Kak Ojan, Kak Dyaz, Kak Rijal, Kak Ria, Kak Hilda, Kak Ayu, Kak Arya, Kak Uya, Kak Man, Kak Bucek, Made, Arfan, Muh Rizal, Opik, Faisal, Agung, teman-teman dan senior lain dari Hml Kom. Ekonomi Unhas, dan Ikatan Mahasiswa Akuntansi yang selalu memberikan motivasi, dan canda tawa kepada peneliti dan memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidup.
12. Teman – teman KKN Gel.93 Kelurahan Galung Kec. Liliraja, Soppeng.
13. BPKD Kabupaten Luwu Timur, terkhusus Kabid. Pendataan bapak Muhammad Said, S.E., M.M.
14. Mama Aji, dan Kak Mia.
15. Kepada seluruh teman-teman BONAFIDE, Manajemen dan Ilmu Ekonomi 2013 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu. Terima kasih atas semua bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 24 Maret 2017

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur

Analysis The Potential and Tax Effectiveness of Non Metallic Minerals and Rocks Tax in Luwu Timur District

**Andi Tenri Dettya Ulang Pangerang
Nirwana
Rusman Thoeng**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar jumlah potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Timur, sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan efektivitas pemungutan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan bahwa potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur belum tercapai secara optimal. Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diberlakukan oleh pihak BPKD Kabupaten Luwu Timur yaitu *self assessment system*. Untuk tahun 2012-2016 kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah terus berfluktuatif. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan potensi menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cukup efektif.

Kata Kunci: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah, Potensi, Efektivitas

This research aims to determine number of Non Metallic Minerals and Rocks Tax, as a source of regional revenue in Luwu Timur District, Non Metallic Minerals and Rocks Tax collection system, Non Metallic Minerals and Rocks Tax contribution to Local Income and the effectiveness of the collection. The Methode used of this research using collecting data technique with literature review. Result of analytical potential income calculations indicates that the potential of Non Metallic Minerals and Rocks Tax in Luwu Timur District is not optimal. Non Metallic Minerals and Rocks Tax collection system used by BPKD of Luwu Timur is self assessment system. For the years 2012-2016 the contribution of Non Metallic Minerals and Rocks Tax on Local Income is fluctuate. The effectiveness shows that the collection and management of Non Metallic Minerals and Rocks Tax is enough.

Keywords: *Non Metallic Mineral and Rocks Tax, Local Revenue, Potential, Effectiveness*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Pajak	13
2.1.1.1 Fungsi Pajak	14
2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak	15
2.1.1.3 Pengelompokan Pajak	16
2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak	17
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	20
2.1.2 Pajak Negara	22
2.1.3 Pajak Daerah	23
2.1.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25
2.1.4.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	26
2.1.4.2 Dasar-dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	27
2.1.4.3 Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28
2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	28
2.1.4.5 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28
2.1.4.6 Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28

2.1.4.7 Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Pajak Terutang	29
2.1.5 Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29
2.1.5.1 Pengertian Potensi.....	29
2.1.6 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3 Jenis dan sumber data.....	36
3.4 Teknik pengumpulan data.....	36
3.5 Metode Analisis Data.....	37
3.5.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	38
3.5.2 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur.....	40
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur	41
4.1.2.1 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur	42
4.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur	43
4.1.2.3 Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur	45
4.2 Pembahasan dan Hasil.....	51
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur	51
4.2.2 Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah.....	53
4.2.3 Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur.....	54
4.2.4 Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur	61
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Keterbatasan Peneliti.....	67
5.3 Saran Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur.....	4
1.2 Rincian Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur	5
1.3 Persentase Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur	6
4.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2016.....	52
4.2 Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur tahun 2012-2016	53
4.3 Kontribusi Pajak MBLB terhadap PAD dan PD di Kabupaten Luwu Timur tahun 2012-2016.....	54
4.4 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak MBLB tahun 2012.....	55
4.5 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak MBLB tahun 2013.....	56
4.6 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak MBLB tahun 2014.....	56
4.7 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak MBLB tahun 2015.....	57
4.8 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak MBLB tahun 2016.....	57
4.9 Potensi Pajak MBLB yang Belum Tergali Periode 2012-2016.....	58
4.10 Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi Penerimaan Pajak MBLB Kabupaten Luwu Timur tahun 2012-2016.....	60
4.11 Efektivitas Penerimaan Pajak MBLB Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Potensi tahun 2012-2016	62
4.12 Efektivitas Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak MBLB tahun 2012-2016	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 Target, Realisasi, dan Potensi pajak MBLB tahun 2012-2016.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1 Biodata	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi oleh bangsa Indonesia membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali sedalam-dalamnya sekaligus seluas-luasnya potensi daerah yang dimilikinya yang bisa di jual untuk memenuhi kebutuhan daerah, khususnya untuk membiayai pembangunan daerahnya agar tidak hanya bergantung pada subsidi pemerintah pusat yang selama ini masih menjadi sumber utama pemerintah daerah.

Pembangunan daerah saat ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan hidup masyarakat dapat dicapai apabila pembangunan yang dilakukan secara merata. Dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berisi tentang pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat lebih mandiri untuk mengurus wilayah daerahnya sendiri. Pemerintah sebagai dinamisator dan stabilisator tentunya melakukan pungutan pajak bukan tanpa alasan, tetapi memiliki tujuan. Tujuan itulah yang mendasarkan bahwa membayar pajak itu wajib untuk warga negara Indonesia.

Penerimaan daerah sendiri bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Jenis dan sumber pendapatan asli daerah yang dominan adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu elemen sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan pemungutan pajak daerah yang berdasar dari potensi penerimaan daerah.

Peningkatan PAD bagi pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri menjadi konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam UU No.34/2000 yang diperbaharui melalui UU No.28/2009 yang berisi tentang, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang No.28/2009. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak provinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan jalan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak ini disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda), salah satu jenis pajak daerah yang diperbolehkan dalam UU No.28/2009 untuk dilakukan pemungutannya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Luwu Timur merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur sendiri merupakan Kabupaten baru di Sulawesi Selatan yang berumur 13 tahun berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kondisi sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur yang membuat pemasukan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pemasok Pendapatan Asli Daerah terbesar, objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Luwu Timur meliputi Batu Gunung, Batu Kali, Kerikil Sungai, Pasir, Pasir Kuarsa, Sirtu, Tanah, dan Tanah Liat sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Luwu Timur No 238 Tahun 2010. Penyumbang dana terbesar dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur adalah PT. Vale Indonesia di mana PT. Vale Indonesia tidak hanya membayar Pajak atas Pengambilan

Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan tetapi juga kewajiban PT. Vale Indonesia kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu pembayaran dana bagi hasil pertambangan umum berdasarkan PP 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan dengan rincian pembagian yaitu 20% Pemerintah Pusat, 16% Pemerintah Provinsi, 32% Pemerintah Daerah (Luwu Timur), dan 32% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dana bagi hasil pertambangan umum kewajiban PT. Vale Indonesia meliputi 2 jenis, pembayaran *royalty* (iuran eksplorasi/eksploitasi) dan *landrent* (iuran tetap) di mana kewajiban ini disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai pemasok pendapatan asli daerah terbesar ini dapat terlihat pada table penerimaan pajak daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur

Pajak	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Pajak Hotel	436.648.112	438.741.440	376.938.442	434.059.500	544.270.922
Restoran & RM	2.347.224.519	3.999.295.412	3.567.156.839	3.428.802.814	3.693.698.382
Pajak Hiburan	7.600.000	7.183.750	15.907.500	7.585.000	18.125.000
Pajak Reklame	37.882.829	208.214.642	262.933.556	300.887.901	363.570.401
Pajak PJ	5.525.877.874	19.743.046.966	27.336.679.573	27.168.717.901	28.267.168.634
Pajak MBLB	31.830.738.932	45.286.149.937	47.618.155.174	40.074.147.420	50.259.725.296
Pajak ABT	-	-	5.116.570.522	5.990.756	10.142.439
BPHTB	368.336.307	95.261.735	167.570.522	143.884.460	604.257.000
PBB	-	-	-	3.150.180.363	3.324.289.663

Sumber: BPKD Kab. Luwu Timur

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Rata-rata penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama lima tahun sebesar Rp. 43.013.783.351,80. persentase

jumlah penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2011 mencapai 49,65% dan mengalami penurunan untuk tahun 2012-2015 sebesar 46,16% 37,65% 29,87% dan 32,22%, meskipun mengalami persentase penurunan dari penerimaan pendapatan asli daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif dibandingkan pajak lainnya.

Tabel 1.2 Rincian Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur.

Periode	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	32.845.000.000,00	31.830.738.932,00	96.91
2012	43.961.685.313,00	45.286.149.937,88	103.01
2013	42.550.000.000,00	47.618.155.174,00	111.91
2014	50.000.000.000,00	40.474.147.420,00	80.95
2015	44.000.000.000,00	50.259.725.296,50	114.23

Sumber: BPKD Kab. Luwu Timur

Tabel 1.2 di atas menunjukkan target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2011 berada dibawah tingkat capaian 100%, sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013 berada diatas tingkat pencapaian tetapi untuk target penerimaannya mengalami penurunan. Tahun 2014 tingkat pencapaian dan realisasi penerimaan mengalami penurunan dari sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2015 tingkat pencapaian berada di atas 100% dengan jumlah realisasi yang meningkat.

Meskipun secara target dalam penetapan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun ke-tahun dapat tercapai, tetapi dalam penetapan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum berdasarkan potensi yang ada, sehingga dalam penetapan target tersebut dimungkinkan terjadinya

kehilangan potensi pajak. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan cara menghitung potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber pajak terbesar Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 1.3 Persentase Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pajak	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Hotel	65.22%	101.66%	87.68%	107.39%	123.70%
Restoran & RM	108.08%	126.88%	91.30%	99.05%	123.99%
Pajak Hiburan	152%	143.68%	227.25%	50.57%	120.83%
Pajak Reklame	25.26	138.81%	101.13%	109.41%	108.53%
Pajak PJ	100.29%	96.50%	107.37%	100.35%	102.57%
Pajak MBLB	96.91%	103.01%	111.91%	80.95%	114.23%
Pajak ABT	-		51.17%	39.67%	101.42%
BPHTB	184,18%	95.26%	111.71%	71.94%	302.13%
PBB	-	-	-	90.01%	105.53%

Sumber: BPKD Kab. Luwu Timur

Melihat tabel 1.3 diatas yang menggambarkan bagaimana persentase target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami presentase yang fluktuatif. Kondisi kelebihan dan kekurangan yang cukup signifikan ini memberikan gambaran bahwa perhitungan potensi yang digambarkan pemerintah daerah bisa saja tidak sesuai. Besarnya target terhadap realisasi mengalami fluktuatif, ini bisa terjadi karena penentuan potensi yang dilakukan belum sesuai atau hanya mendasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pencapaian target suatu potensi, pemerintah daerah mendapatkan *Reward* dari hasil kinerja pemerintah dalam mencapai potensi tersebut. *Reward* yang diberikan seharusnya sesuai dengan kinerja pemerintah daerah, bukan hanya berdasar dari besaran realisasi dari target yang di dapatkan yang tidak menggambarkan keadaan potensi sebenarnya.

Dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak, hingga saat ini sebuah instansi dalam pemungutan pajak masih menggunakan sistem target, yakni sistem pemungutan pajak tersebut ditentukan dari jumlah target tahun sebelumnya. Apabila target sebelumnya tercapai, maka target tahun ini akan dinaikkan dan begitu pula sebaliknya jika target tahun sebelumnya tidak tercapai maka target tahun ini akan diturunkan. Penggunaan tolak ukur ini masih belum menggambarkan keberhasilan penerimaan pajak yang sesungguhnya karena apabila pemungutan pajak tersebut berpatokan pada target tahun sebelumnya maka akan dipertanyakan apakah realisasi pendapatan pajak yang di setor ke kas daerah adalah yang menggunakan sistem target tersebut telah sesuai dengan potensi rilnya atau belum, dengan kata lain penerimaan pajak tersebut sudah maksimal atau belum.

Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Melalui permasalahan tersebut maka diperlukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan guna mendapatkan gambaran mengenai potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Penetapan dengan Perda ini bertujuan agar setiap pemungutan pajak daerah mempunyai kekuatan payung hukum yang jelas. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 di dalam Peraturan daerah (Perda) yang mengatur pemungutan pajak daerah juga diatur tentang penetapan tarif pajak daerah. Tarif pajak daerah merupakan tolak ukur

bagi penerimaan suatu jenis pajak daerah. Tarif pajak daerah hendaknya mencerminkan potensi pajak daerah tersebut, sehingga target yang ditetapkan mempunyai patokan yang jelas dan penerimaannya pun dapat dioptimalkan.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak ini disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda), salah satu jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan pemungutannya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi Kabupaten Luwu Timur yang sementara berkembang dengan jumlah penambangan yang terus memproduksi memungkinkan adanya Wajib Pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Dimana menurut Mardiasmo (2011:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan Halim (2007:96).

Penelitian mengenai potensi dan efektivitas pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Pamela Indira Lasut, Grace B. Nangony, dan Rudy Pusung yang menguji efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota tomohon, dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011 tingkat

efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemkot Tomohon, agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif menjadi saran dalam penelitian tersebut. Penelitian tersebut di perkuat oleh penelitian dari Indah Rahmawati (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga selalu lebih besar daripada realisasi penerimaan DPPKAD kecuali pada tahun 2013. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali di tahun 2013 sangat efektif. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Enggar D. P. A (2011) Hasil yang diperoleh adalah: penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 2002 – 2009 mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada pada kategori sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai sektor yang sangat efektif dan efisien. Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPI.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menguji lebih lanjut potensi dan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada objek dan waktu penelitiannya. Penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Luwu Timur. Motivasi terbesar penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur sebagai pajak daerah terbesar di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Seberapa besar potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terutama aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak mineral bukan logam Kabupaten Luwu Timur sebagai sumber pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari ketiga definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai ketiga definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja.

Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara atau Daerah, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak Mardiasmo (2016:4), yaitu.

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi tingkat konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat Mardiasmo (2016:4) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2016:7) mengelompokkan pajak ke dalam beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu.

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Menurut Smith dalam Erly (2008:27-28) asas-asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Asas persamaan (*Equality*)

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality*, tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak.

2. Asas kepastian (*Certainty*)

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan pembayarannya.

3. Asas menyenangkan (*Convenience of payment*)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Asas efisiensi (*Economic of collections*)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri karena pemungutan pajak tidak akan

ada artinya jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari Mardiasmo (2016:9-10) sebagai berikut.

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Pajak

Kewajiban dan hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016:59-60) adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
 - 1) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
2. Hak Wajib Pajak
- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
 - b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
 - c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
 - d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
 - e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
 - f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
 - g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
 - h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.
 - i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
 - j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
 - k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.2 Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku Mardiasmo (2016:13-14) adalah.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan merupakan pengganti.

- a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.
 - b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923.
 - c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.
 - d. Ordonansi Verponding tahun 1982.
 - e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942.
 - f. Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
 - g. Undang-undang nomor 11 Prp. tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

2.1.3 Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi poliotik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian Mardiasmo (2016:15), yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan

- e. Pajak rokok
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.1.4 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlakunya Undang-Undang No 28 tahun 2009 antara lain bertujuan untuk penyempurnaan dan penataan kembali beberapa jenis pajak daerah dan retribusi yang pada hakikatnya terjadi pola pembagian jenis-jenis pajak dan penciptaan jenis pajak baru dan untuk kemudahan administrasi sehingga realisasi penerimaan pajak daerah diharapkan sesuai dengan *Tax Capacity* yang ada, penyederhanaan

jenis-jenis pajak dan retribusi dan memberikan beban yang lebih adil kepada masyarakat.

Salah satu bentuk penataan kembali retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sebelumnya dalam Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dikategorikan sebagai Retribusi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c yang kemudian diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain disebabkan pengambilan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bersifat pajak, penataan kembali pajak ini bertujuan untuk lebih memberikan perhatian pada masalah dan pelestarian lingkungan sebagai dampak kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan tersebut.

2.1.4.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang saat ini diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Azhari (2015:247) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 huruf f Undang-Undang No 34 tahun 2000), baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam meliputi Asbes, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (*halite*), Grafit, Gips, Kalsit, Kaolin, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opasidien, Oker, Pasir kuarsa, Perlit, Fospat, Talk, Tawas

(*alum*), Yarosif, Zeolite, dan Mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek pajak yang termasuk batuan meliputi Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Granit / andesit, Leusit, Pasir dan kerikil, Tanah serap (*full earth*), Tanah diatome, Tanah liat, Trakkit, dan Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. 2 Dasar Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Ditinjau dari segi lapangan pajak, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jenis pajak daerah kota/kabupaten, sehingga petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan akan di atur dalam Peraturan daerah kota/kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010, dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
3. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

2.1.4.3 Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan Wajib Pajak adalah:

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

2.1.4.5 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2.1.4.6 Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak MBLB = Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan X Tarif Pajak.

2.1.4.7 Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

1. Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.
2. Masa pajak terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau ditetapkan lain oleh Bupati.
3. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat mulai diselenggarakan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.1.5 Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.1.5.1 Pengertian Potensi

Kata potensi berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu *potencial*. Artinya ada dua kata, yaitu, (1) kesanggupan; tenaga (2) dan kekuatan; kemungkinan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Artinya, secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan Majdi (2007:86).

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Iktama (2012) menuliskan rumus untuk perhitungan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut.

$$Pt = \sum_{i=1}^n VI \times Hrg \times Tr$$

Dimana:

Pt : Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

$\sum_{i=1}^n$: Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n mineral bukan logam dan batuan

VI : Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m^3 /tahun

Hrg : Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan Rp/ m^3

Tr : Besarnya tarif pajak

2.1.6 Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektifitas menurut John (1986:35) adalah: “Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif”. Menurut Mardiasmo (2011:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas menurut Halim (2002:129) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Efektivitas potensi adalah angka indeks atau rasio antara realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perhitungan efektivitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan pajak. Adapun cara untuk mengukur efektivitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut Abdul Halim (2008:234):

$$\text{Efektifitas Potensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Tingkatan efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

- 1 Sangat efektif yaitu > 100%
- 2 Efektif antara 90 – 100%
- 3 Cukup efektif antara 80 – 90%
- 4 Kurang efektif antara 60 – 80%
- 5 Tidak efektif bila < 60%

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu penelitian oleh Pamela dkk dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon” Penelitian ini dilakukan untuk

memahami secara mendalam pada setting penelitian dan berusaha mengungkapkan secara apa adanya. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan dan upaya pemungutan Pajak pengambilan dan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota tomohon.
2. Kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah di kota tomohon.

Penelitian oleh Enggar dkk yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah Propinsi Jambi. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.

Firrawan yang berjudul “Potensi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Kayong Utara”. Dimana tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana potensi BPHTB, juga efektivitas dan efisiensi pemungutan BPHTB di Kabupaten Kayong Utara. Serta untuk melihat apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam pemungutan BPHTB.

Rahmawati (2014) yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta mengetahui strategi terbaik yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga selalu lebih besar daripada realisasi penerimaan DPPKAD kecuali pada tahun 2013. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gresik berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif. Sedangkan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif kecuali di tahun 2013 sangat efektif.

2.3 Kerangka Pemikiran

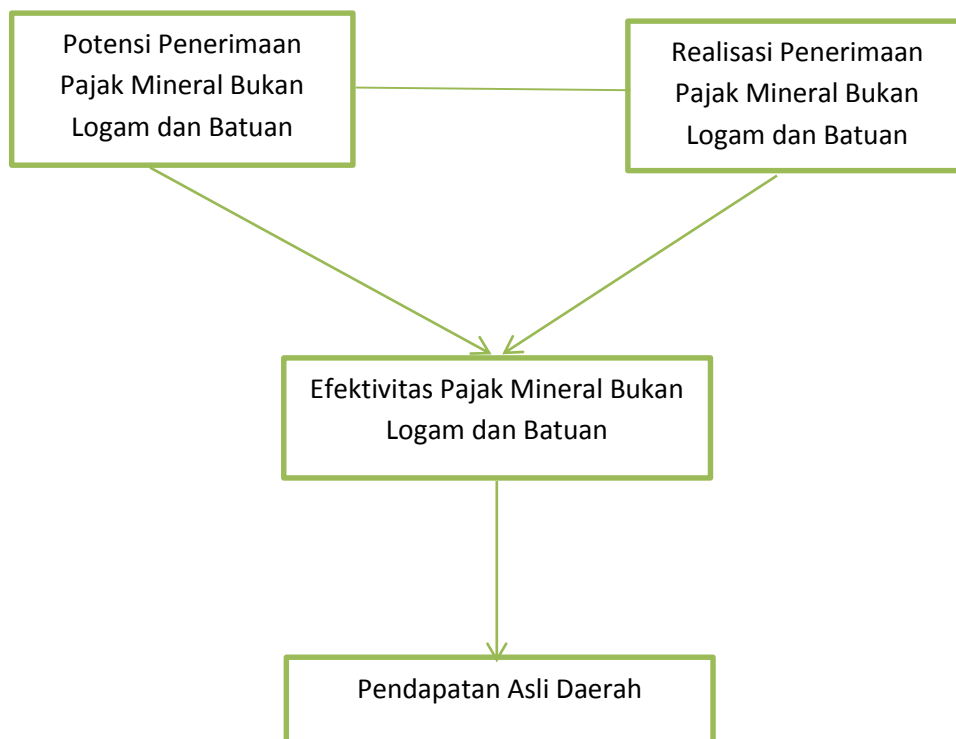
Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak Daerah. Salah satu dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dimana basis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diperoleh dari penjumlahan antara nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikalikan tarif pajak, sehingga diperoleh potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Apabila potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diterima, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dihasilkan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan kontribusi sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bila di tinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2011). Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan besaran potensi dan persentase efektivitas yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur. Unit analisis dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili. Sedangkan waktu peneliti butuhkan dua bulan yang dilakukan pada bulan Februari 2017 s/d bulan Maret 2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Subyek yaitu data yang didapatkan peneliti melalui wawancara langsung dengan staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Data Fisik yaitu data yang didapatkan peneliti dari buku atau literatur yang dapat mendukung penelitian ini.
3. Data Dokumenter yaitu data yang didapatkan peneliti dari jurnal atau artikel yang dapat mendukung penelitian ini.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Tinjauan Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan data penelitian.

4. Observasi

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan potensi yang dimiliki Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Timur.

3.5.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pertama perlu diketahui tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Potensi PMBLB} = \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Semakin besar hasilnya, maka semakin besar potensi penerimaan yang bakal diterima sebagai penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3.5.2 Efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka efektifitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang didapatkan dari jumlah penerimaan potensi pajak yang telah ditetapkan dalam suatu periode.

Adapun cara untuk mengukur efektifitas pungutan pajak adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan. Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sangat efektif yaitu $> 100\%$
2. Efektif antara $90 - 100\%$
3. Cukup efektif antara $80 - 90\%$
4. Kurang efektif antara $60 - 80\%$
5. Tidak efektif bila $< 60\%$

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Luwu Timur dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010. Adapun kesimpulan dari fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tahun 2012 sebesar Rp.55.471.336.646,- pada tahun 2013 sebesar Rp.56.467.308.000,- tahun 2014 sebesar Rp.53.373.471.000,- tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 sebesar Rp.55.434.480.000,- dan pada tahun 2016 sebesar Rp.55.577.668.000,-.
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu timur tahun 2012 mencapai 46,16%. Tahun 2013 sebesar 37,65%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 29,87%. Tahun 2015 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 32,22%, dan tahun 2016 kembali mengalami penurunan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya mencapai 27,78%.
3. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2012-2016 berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif dengan persentase 102.88% tiap tahunnya. Sedangkan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

berdasarkan potensi penerimaan rata-rata menunjukkan cukup efektif dengan persentase 84,37% tiap tahunnya.

5.2 Keterbatasan Peneliti

1. Pada penelitian ini peneliti memiliki pembahasan yang terbatas. Pembahasan hanya mengenai potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pendapatan asli daerah yang terkait dengan sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan itu sendiri, potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pendapatan asli daerah dan pajak daerah, serta efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mengambil sampel hanya dalam jangka waktu selama lima tahun yaitu tahun 2012-2016 sehingga tingkat keakuratan hasil analisis masih kurang lengkap.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan.

1. Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya BPKD Kabupaten Luwu Timur sebaiknya memaksimalkan kerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melakukan pendataan ulang terhadap subjek pajak, Wajib Pajak, dan objek pajak serta izin usaha pertambangan (IUP) sehingga penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih maksimal.
2. Sosialisasi secara keseluruhan terkait Perda pajak mineral bukan logam, tidak hanya pada pengusaha tambang yang aktif saja namun kepada

seluruh masyarakat. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak setempat seperti pihak kecamatan, desa dan/atau kelurahan untuk mensosialisasikan Perda. Hal ini dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses perizinan dan mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini BPKD untuk menambah petugas lapangan, menerapkan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajibannya dan melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin di wilayah yang rawan akan produktivitas dan/atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- D. P. A Enggar, Rahayu Sri dan I. Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi, Jambi.
- Firrawan Junaidi. 2013. Potensi dan Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Kayong Utara. Kayong Utara.
- Halim Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah: revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.
- 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.
- 2016. Perpajakan: edisi terbaru 2016. Yogyakarta. Andi.
- Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- P.I Lasut., G.B Nangoy., R. Pusung. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rahmawati Indah. 2014. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. Universitas Brawijaya
- Rochmat, Soemitro. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Eresco.
- Said Darwis, Mardiana Ria, Rahmatia, Amar Muhammad Yunus, Habbe Abdul Hamid, Damayanti Ratna A, Pontoh Grace, Djaya Yansor, Thayf Hendragunawan S, Fattah Sanusi. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Samudra Azhari Aziz. 2015. Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business 5th Edition*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd

Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 238 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nilai Pasar Masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Kombinasi. Jakarta,

----- 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung.

Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

----- Nomor 33 Tahun 2004. 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

----- Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.

----- Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. 2000. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yozerizal. 2009. Research Operasional: *Efektif dan Efisien*, (online), (<https://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>, diakses 07 Desember 2016).

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Wikipedia Bahasa Indonesia. 2016. *Kabupaten Luwu Timur*, (online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur, diakses 05 Desember 2016).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Andi Tenri Dettya Uleng Pangerang
 Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 April 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Pengayoman, Komp. Gladiol Blok C No. 2
 No. Telp : 085255066668
 Email : ulndtty@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1 Malili (2001-2007)
 - b. SMP Negeri 1 Malili (2007-2010)
 - c. SMA Dwiwarna Boarding School Bogor (2010-2013)
2. Pendidikan Non Formal/Training/Seminar
 - a. Pelatihan *Basic Character Study Skill* Universitas Hasanuddin (2013)
 - b. Latihan Kepemimpinan I Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin (2014)
 - c. *Basic Training* Himpunan Mahasiswa Islam Kom. Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2015)

Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Akuntansi, Anggota Departemen Pengaderan (Periode 2015-2016)
2. Himpunan Mahasiswa Islam, Anggota Bdg. Administrasi dan Kesekretariatan (Periode 2016-2017)

Makassar, Mei 2017

Andi Tenri Dettya Uleng Pangerang